

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pilar perekonomian Indonesia dengan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, distribusi pendapatan, dan pengurangan kemiskinan serta pengangguran (Sulindawati, 2022). UMKM berperan menjadi tulang punggung perekonomian lokal dan nasional, yang kontribusinya lebih dari 60% terhadap PDB (produk domestik bruto), menyerap hingga sekitar 97% tenaga kerja, serta memiliki lebih dari 65 juta unit usaha yang tersebar di berbagai sektor (Kemenkeu, 2024). Meskipun kontribusinya sempat menurun menjadi 37,3%–37,8% akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020, sektor ini menunjukkan ketahanan dan pemulihan cepat dengan kontribusi kembali meningkat menjadi 60–61% pada periode 2021–2023 Kholifah & Andini (2024), yang menegaskan bahwa kesehatan UMKM daerah mencerminkan stabilitas ekonomi nasional.

UMKM di Provinsi Bali memiliki peran strategis dalam mendorong PDRB (pendapatan domestik regional bruto), dan penyerapan tenaga kerja, serta penurunan kemiskinan melalui struktur ekonomi yang lebih inklusif (Thesia & Karmini, 2022). Pertumbuhan nilai produksi UMKM terbukti berkorelasi dengan peningkatan tenaga kerja, khususnya pada sektor perdagangan, kerajinan, dan industri rumahan sebagai penyangga ekonomi di luar pariwisata (Yudha & Purbadharmaja, 2019). Selain itu, dukungan akses pembiayaan seperti program penjaminan kredit daerah (Jamkrida) terbukti meningkatkan pendapatan pelaku

UMKM dan kapasitas perekrutan tenaga kerja Bagiana & Bendesa, (2024), yang menunjukkan bahwa penguatan akses modal serta kebijakan pendukung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Kabupaten Karangasem merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bali yang menghadapi tantangan pembangunan yang relatif lebih berat dibandingkan kabupaten lainnya, tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Bali sebesar 71,89 serta jumlah penduduk miskin mencapai 27.320 jiwa atau 6,40%-6,52% dari total penduduk, yang merupakan persentase tertinggi di Provinsi Bali (BPS Provinsi Bali, 2025). Kondisi ini semakin diperparah oleh dampak krisis pada sektor pariwisata yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, sehingga UMKM menjadi alternatif strategis dalam menyediakan sumber penghasilan dan menciptakan lapangan kerja baru (Thesia & Karmini, 2022). Berbeda dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Bali yang mempunyai tingkat kemiskinan relatif lebih rendah dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang lebih tinggi (BPS Kabupaten Karangasem, 2025). Kabupaten Karangasem masih menghadapi tantangan pembangunan yang cukup besar sehingga keberadaan UMKM berperan krusial dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan stabilisasi ekonomi daerah (Nasution & Burhanuddin, 2023).

Tabel 1. 1.
Jumlah dan Klasifikasi UMKM Kabupaten Karangasem

Tahun	Jumlah UMKM	Mikro		Kecil		Menengah	
		jumlah	%	jumlah	%	Jumlah	%
2022	40.614	40.614	100%	-	0%	-	0%
2023	50.717	50.647	99,86%	45	0,08%	25	0,04%
2024	53.459	52.793	98,75%	625	1,14%	41	0,07%

(Sumber: Diskopukm, 2023 dan IDN Times Bali, 2025)

Berdasarkan tabel tersebut, UMKM di Kabupaten Karangasem yang masih didominasi usaha mikro, meskipun jumlah totalnya cenderung meningkat disetiap tahunnya. Pada tahun 2022, seluruh UMKM yaitu 40.614 unit masih tergolong usaha mikro atau sebesar 100 persen. Pada tahun 2023, jumlah UMKM meningkat menjadi 50.717 unit, namun komposisinya tetap didominasi usaha mikro sebanyak 50.647 unit atau 99,86 persen, sementara usaha kecil dan menengah masing-masing hanya berjumlah 45 unit atau 0,08 persen dan 25 unit atau 0,04 persen. Kondisi serupa juga terlihat pada tahun 2024, ketika total UMKM kembali naik menjadi 53.459 unit, dengan usaha mikro masih mendominasi sebanyak 52.793 unit atau 98,75 persen, sedangkan usaha kecil hanya 625 unit atau 1,14 persen dan usaha menengah 41 unit atau 0,07 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah UMKM mengalami pertumbuhan, sebagian besar pelaku usaha di Kabupaten Karangasem berada pada skala mikro, sehingga mengindikasikan bahwa proses peningkatan kelas usaha belum berjalan optimal dan memperlihatkan perlunya penguatan kinerja keuangan agar UMKM dapat berkembang ke skala yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa peningkatan jumlah UMKM belum tentu mencerminkan penguatan kinerja keuangan yang berkelanjutan. Kinerja keuangan yang rendah dapat membatasi kemampuan UMKM untuk berkembang dari skala mikro menuju usaha kecil maupun menengah, karena keterbatasan modal kerja dan rendahnya kemampuan melakukan reinvestasi akan menghambat inovasi serta ekspansi usaha (Nursini, 2020; Tambunan, 2019). Di Kabupaten Karangasem, dominasi usaha mikro yang konsisten berada di atas 98% menunjukkan bahwa pelaku usaha masih berada pada tahap bertahan atau survival dan belum

sempurnanya berorientasi pada pertumbuhan. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam kinerja finansial UMKM di daerah tersebut (Fitrianita & Sinarwati, 2024). Lemahnya kinerja keuangan juga berpotensi meningkatkan risiko kredit bermasalah, sebagaimana tercermin dari rasio NPL kredit UMKM di kabupaten/kota yang berada di Provinsi Bali pada tahun 2024 yang mendekati angka NPL nasional sebesar 2,94% (OJK, 2024). Dengan demikian, kesehatan keuangan UMKM tidak hanya menentukan keberlanjutan usaha, tetapi juga akan mempunyai implikasi terhadap stabilitas sektor perbankan dan sistem keuangan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan kondisi tersebut, berikut disajikan data NPL Kredit UMKM di Provinsi Bali dari tahun 2022 sampai tahun 2024.

Tabel 1. 2.
Non-Performing Loan (NPL) Provinsi Bali 2022-2024

No	Kabupaten/Kota	<i>Non Performing Loan (NPL) (Dalam %)</i>			
		2022	2023	2024	Rata-Rata
1	Karangasem	4,11	3,67	2,56	3,31
2	Buleleng	4,26	3,19	2,86	3,28
3	Klungkung	4,25	3,35	1,54	2,80
4	Denpasar	3,24	2,87	2,36	2,67
5	Jembrana	1,80	1,23	2,46	1,85
6	Badung	2,81	1,88	1,10	1,74
7	Tabanan	1,83	1,77	1,59	1,70
8	Gianyar	0,75	1,28	0,76	0,95
9	Bangli	1,22	1,13	0,52	0,90

(Sumber: Bank Indonesia, 2025)

Mengacu pada data NPL Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2022–2024, Kabupaten Karangasem menunjukkan rata-rata NPL tertinggi dibandingkan daerah lainnya, yakni sebesar 3,31%, lebih tinggi dari Buleleng (3,28%) dan Klungkung (2,80%). Meskipun secara tren terjadi penurunan, tercatat sebesar 4,11% pada tahun 2022, yang kemudian menyusut menjadi 2,56% pada penutupan tahun 2024, angka tersebut tetap mencerminkan tingkat risiko kredit yang relatif

lebih besar dibandingkan sebagian besar kabupaten/kota di Bali. Posisi ini mengindikasikan bahwa kualitas kredit UMKM di Karangasem masih menghadapi tekanan yang cukup signifikan. Tingginya rasio NPL menjadi sinyal bahwa sebagian Pengusaha UMKM menghadapi kendala dalam menyelesaikan tanggung jawab pembayaran utang atau kredit mereka.

Permasalahan keterlambatan pembayaran utang atau kredit yang dialami pelaku UMKM bukan disebabkan oleh ketidakmauan untuk memenuhi kewajiban, melainkan lebih dipengaruhi oleh kondisi kinerja keuangan usaha yang belum stabil. Sebagian besar pelaku usaha mengungkapkan bahwa pendapatan yang diperoleh cenderung fluktuatif, sementara kebutuhan operasional usaha harus tetap dipenuhi setiap periode. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan informan dari sektor UMKM yang mengungkapkan bahwa:

“Yen suba angsuran, tusing ja iraga sing nyak mayah. nak penjualan ane menek tuun, pisse telah anggon modal ajak oprasionalne. pendapatan sing maan, jadine sing ngidaang mayah cicilan pas ajak waktune.”

(“Kalau soal angsuran, bukannya saya tidak mau bayar, penjualan naik turun, uang habis pakai modal dan oprasional, pendapatan tidak dapat, jadinya tidak mampu bayar cicilan tepat waktu”)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM terletak pada ketidakstabilan arus kas dan terbatasnya laba usaha, sehingga kemampuan dalam memenuhi kewajiban kredit menjadi terganggu. Dalam kondisi ini, laba yang diperoleh lebih banyak dialokasikan untuk menjaga kelangsungan operasional usaha dibandingkan untuk pembayaran kewajiban finansial (Devi dkk, 2021).

Penurunan kinerja keuangan menyebabkan UMKM mengalami hambatan dalam menjaga stabilitas arus kas, menghasilkan laba, serta memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman secara tepat waktu, sehingga berkontribusi terhadap

peningkatan kredit bermasalah (Nusrini, 2020). Kinerja keuangan sendiri merupakan ukuran efektivitas pemanfaatan aset dan kemampuan usaha dalam menghasilkan laba sebagai indikator keberhasilan operasional (Herfina & Muchda, 2025). Laba usaha menjadi komponen utama dalam menilai kesehatan finansial UMKM, ketika laba menurun, kemampuan membayar cicilan dan bunga pinjaman turut terdampak, yang pada akhirnya meningkatkan rasio NPL (Fitrianita & Sinarwati, 2024). Dengan demikian, tingginya rata-rata NPL di Kabupaten Karangasem dapat digambarkan sebagai bentuk refleksi dari persoalan struktural pada kinerja keuangan UMKM, terutama dalam aspek profitabilitas, likuiditas, dan pengelolaan kewajiban keuangan.

Kondisi ini semakin relevan jika dikaitkan dengan struktur UMKM di Karangasem yang masih didominasi oleh usaha mikro, yang biasanya memiliki keterbatasan modal, dan kapasitas manajerial, serta akses pasar. Ketika kinerja keuangan melemah, risiko pembiayaan yang ditanggung lembaga keuangan meningkat, sekaligus mempersempit peluang UMKM untuk memperoleh akses kredit lanjutan guna mengembangkan usahanya (Lestari, 2025; Aminda dkk., 2023). Oleh karena itu, tingginya NPL di Kabupaten Karangasem tidak hanya menjadi indikator risiko sektor perbankan, tetapi juga mencerminkan urgensi untuk memperkuat faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan UMKM agar mampu tumbuh secara berkelanjutan dan menurunkan potensi kredit bermasalah di masa mendatang.

Menurut *Entrepreneurial Ecosystem Theory* (EET), kinerja keuangan UMKM tidak hanya ditentukan dengan aktivitas internal, kinerja keuangan UMKM merupakan hasil dari interaksi berbagai elemen dalam suatu ekosistem usaha.

Kinerja keuangan dapat dipahami sebagai cerminan dari tingkat kesehatan ekosistem tersebut secara keseluruhan. Stam dan Spigel (2016) menjelaskan bahwa pertumbuhan dan keberlanjutan usaha lahir dari interaksi yang bersifat sistemis antara pelaku kewirausahaan dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan institusional. Dalam konteks UMKM, kinerja keuangan yang optimal akan lebih mudah tercapai ketika pilar-pilar ekosistem seperti budaya kewirausahaan (*spirit*), dukungan finansial, modal manusia dalam bentuk literasi, serta kebijakan pemerintah mampu berinteraksi secara sinergis. Sinergi ini pada akhirnya berperan dalam menekan biaya transaksi (*transaction costs*) sekaligus meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya.

Entrepreneurial Ecosystem Theory (EET) sebagai kerangka pemikiran dengan memfokuskan pada empat pilar utama dari enam pilar yang dikemukakan oleh Isenberg, yaitu budaya (*culture*), keuangan (*finance*), modal manusia (*human capital*), dan kebijakan (*policy*). Menurut Stam (2015), ekosistem kewirausahaan bersifat dinamis sehingga peneliti dapat memprioritaskan elemen yang paling relevan terhadap output yang diteliti. Dalam hal ini, pilar budaya tercermin melalui *entrepreneurial spirit* yang mendorong pelaku UMKM lebih proaktif dan inovatif, serta berani menghadapi tantangan untuk mengembangkan usahanya (Sari & Firdaus, 2025). Pilar keuangan dan modal manusia tercermin melalui akses permodalan dan literasi keuangan yang memberikan peluang untuk pelaku usaha memperoleh sumber pembiayaan serta mengelola keuangan secara optimal guna mendukung peningkatan kinerja UMKM (Lestari, 2025; Sari & Firdaus, 2025). Sementara itu, pilar kebijakan tercermin melalui dukungan kebijakan pemerintah yang menciptakan lingkungan usaha yang kondusif melalui regulasi, program, dan

insentif bagi pelaku UMKM (Haikal dkk., 2024). Adapun pilar pasar (*markets*) dan dukungan (*supports*) tidak dianalisis secara langsung karena penelitian ini lebih berfokus pada faktor yang berkaitan dengan kapasitas internal pelaku usaha dan akses terhadap sumber daya utama. Secara teoretis, EET menjelaskan bahwa interaksi antar elemen dalam ekosistem kewirausahaan akan membentuk kapabilitas kolektif yang dapat meningkatkan efisiensi sumber daya dan mendukung stabilitas serta pertumbuhan kinerja usaha (Roundy dkk., 2017; Stam & Van de Ven, 2021).

Fenomena tingginya angka NPL di Kabupaten Karangasem, mengindikasikan adanya disfungsi pada pilar-pilar ekosistem tersebut. Tingginya risiko gagal bayar ini mencerminkan kinerja keuangan yang lemah, di mana UMKM tidak mampu Menghasilkan arus dana operasional yang optimal dalam pemenuhan tanggungan kontraktualnya. Dalam kacamata EET, hal ini terjadi karena hambatan pada akses permodalan yang belum inklusif serta kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mampu menciptakan *enabling environment* yang kondusif. Akibatnya, tidak mencapai profitabilitas yang stabil untuk ekspansi, UMKM di Karangasem justru terjebak dalam risiko pembiayaan yang tinggi, sehingga relevan untuk menguji bagaimana pilar-pilar ekosistem ini secara kolektif memengaruhi kinerja keuangan UMKM.

Pilar pertama yang menjadi determinan internal dalam kerangka *Entrepreneurial Ecosystem Theory* (EET) adalah *entrepreneurial spirit* (jiwa kewirausahaan) yang berada dalam pilar budaya (*culture*). Semangat ini berperan sebagai penggerak utama inovasi dan keberanian dalam mengambil risiko yang terukur, sehingga mendorong pelaku UMKM untuk melakukan reinvestasi laba

secara produktif. Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada penguatan struktur modal serta peningkatan kinerja keuangan jangka panjang. Farida dan Setiawan (2022) menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan yang kuat mampu mengoptimalkan kapabilitas inovasi dan pemanfaatan peluang pasar, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan usaha secara signifikan. Secara konseptual, *entrepreneurial spirit* terefleksi lewat keberanian menghadapi risiko bisnis, dorongan kuat untuk terus berkreasi dan berinovasi, kepercayaan diri yang mantap, dan ketepatan dalam membaca celah serta peluang pasar. Dalam perspektif EET, dimensi inovatif, proaktif, dan *risk-taking* menjadi faktor kunci yang membentuk perilaku adaptif pelaku usaha terhadap dinamika lingkungan bisnis (Covin & Wales, 2019), sekaligus memengaruhi kualitas pengambilan keputusan finansial seperti perencanaan keuangan, reinvestasi laba, dan investasi produktif.

Hasil wawancara awal dengan pelaku UMKM di Kabupaten Karangasem mengindikasikan bahwa sebagian pelaku usaha masih kekurangan *entrepreneurial spirit* yang tangguh dalam memajukan usaha mereka. Sebagian pelaku usaha cenderung menjalankan usaha secara rutin tanpa melakukan inovasi, belum berani mencoba strategi baru, dan lebih memilih mempertahankan kondisi usaha yang ada meskipun pertumbuhan pendapatan masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya *entrepreneurial spirit* dapat berdampak pada lambatnya perkembangan usaha dan melemahnya kinerja keuangan UMKM. Narasumber yang merupakan pemilik usaha warung sembako menyampaikan bahwa:

“Tiang masih ngejalanin usaha alah biasane, tusing bani nyobak apa-apa ane baru, nak takut rugi nyanan. Ane penting usahane terus jalan jak ade penghasilan harian”.

(“Saya masih jalankan usaha seperti biasanya saja, belum berani coba hal baru karena takut rugi nanti. Yang penting usaha tetap jalan dan ada pemasukan harian.”)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha masih memiliki sikap yang cenderung pasif, kurang inovatif, dan belum berorientasi pada pengembangan usaha secara lebih maju. Rendahnya keberanian mengambil risiko dan minimnya inisiatif untuk melakukan pembaruan usaha membuat peluang peningkatan pendapatan menjadi terbatas. Pelaku UMKM lainnya juga mengungkapkan bahwa:

“Yening penjualan sane mangkin kari cukup untuk kebutuhan sehari hari, dadosne tiang durung makeneh nambahin produk atau ngedenang pasar.”

(“Kalau penjualan sekarang masih cukup untuk kebutuhan sehari-hari, jadi belum terpikir untuk menambah produk atau memperluas pasar”).

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa usaha belum dikelola dengan semangat pertumbuhan yang kuat, melainkan masih berorientasi pada keberlangsungan jangka pendek. Akibatnya, usaha menjadi sulit berkembang, laba yang dihasilkan tidak meningkat secara signifikan, dan kemampuan untuk memperkuat kinerja keuangan pun menjadi terbatas. Dengan demikian, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa rendahnya *entrepreneurial spirit*, yang tercermin dari kurangnya inovasi, minimnya inisiatif, dan rendahnya keberanian mengambil risiko, dapat berpotensi menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya peningkatan kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Karangasem..

Entrepreneurial spirit atau jiwa kewirausahaan merupakan salah satu aspek penting yang berperan dalam menentukan tingkat keberhasilan usaha serta mendorong peningkatan kinerja UMKM, karena mencerminkan sikap proaktif, inovatif, serta keberanian pelaku usaha dalam mengambil risiko untuk mengembangkan bisnisnya. Suwandi dkk. (2024) menemukan bahwa jiwa kewirausahaan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan dan profitabilitas UMKM, karena mendorong pelaku usaha untuk terus mencari peluang baru dan

meningkatkan efisiensi usaha. Gemina dkk. (2024) juga menegaskan bahwa *entrepreneurial spirit* berkontribusi terhadap keberhasilan usaha melalui peningkatan daya saing dan efektivitas operasional. Selain itu, Rifai (2019) juga mengungkapkan bahwa jiwa kewirausahaan memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Bandung. Berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya, Rinofah dkk. (2022) menunjukkan bahwa jiwa kewirausahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja operasional UMKM.

Pilar kedua adalah akses permodalan, yang dalam konteks EET merupakan pilar keuangan (*finance*). Akses permodalan dipandang sebagai salah satu aspek eksternal yang memiliki peranan penting dalam mendukung kinerja keuangan UMKM. Dalam kerangka *Entrepreneurial Ecosystem Theory* (EET), ketersediaan financial capital menjadi elemen utama dalam membentuk kualitas ekosistem kewirausahaan di suatu wilayah, karena keberhasilan suatu usaha tidak semata-mata ditentukan oleh karakteristik pelaku usaha, melainkan juga dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya finansial yang memungkinkan investasi, inovasi, dan ekspansi (Stam & Spigel, 2016). Akses permodalan merujuk pada kemampuan pelaku UMKM memperoleh dana dari lembaga keuangan formal maupun nonformal dengan prosedur yang wajar, biaya terjangkau, serta informasi yang memadai. Modal yang cukup memungkinkan peningkatan kapasitas produksi, perbaikan kualitas produk, perluasan pasar, serta stabilisasi arus kas usaha. Secara konseptual, akses permodalan berkaitan langsung dengan kinerja keuangan melalui peningkatan laba, likuiditas, dan akumulasi aset. UMKM yang memiliki akses permodalan yang memadai lebih mampu melakukan reinvestasi dan menjaga keberlanjutan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan pelaku UMKM di Kabupaten Karangasem, diperoleh informasi bahwa keterbatasan akses terhadap permodalan masih menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan usaha. Sebagian pelaku usaha menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh tambahan modal dari lembaga keuangan formal karena terbatasnya persyaratan administrasi, minimnya agunan, serta prosedur pinjaman yang dinilai cukup rumit. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha harus menjalankan usaha dengan modal yang terbatas sehingga kapasitas produksi, perluasan pasar, dan pengembangan usaha menjadi terhambat. Narasumber yang memiliki usaha bengkel motor mengungkapkan:

“Tiang sujatine suba nyobak ngalih modal uli bank, nanging prosesne jek kewe, persyaratanne liu. akhirne tiang nganggon modal tiange padidi, padahal yen tiang nganggo modal tambahan usahane ngidaang lebih berkembang.”

(“Kalau modal dari bank sebenarnya pernah coba, tetapi prosesnya cukup sulit karena diminta syarat yang banyak. Jadi akhirnya saya hanya pakai modal sendiri saja, padahal kalau ada tambahan modal usaha bisa lebih berkembang”).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan membuat pelaku usaha sulit menambah skala usahanya. Akibatnya, usaha cenderung berjalan pada kapasitas yang sama, tidak mampu meningkatkan volume penjualan secara signifikan, dan laba yang diperoleh juga relatif terbatas. Pelaku UMKM lainnya yang memiliki usaha warung sembako juga mengungkapkan bahwa:

“Modal pepes sajan dadi kendala, santukan yening jinahe uli hasil medagang punika kaanggen malih numbas barang, kadang-kadang nenten cukup anggon nambah stok atau ngedenan usaha.”

(“Modal sering jadi kendala, karena kalau uang hasil jualan dipakai lagi untuk belanja barang, kadang tidak cukup untuk nambah stok atau memperbesar usaha”).

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa keterbatasan modal menyebabkan pelaku usaha kesulitan menjaga kelancaran operasional sekaligus melakukan pengembangan usaha. Dalam jangka panjang, hal ini berdampak pada rendahnya pertumbuhan pendapatan, terbatasnya akumulasi aset, dan melemahnya kinerja keuangan UMKM. Dengan demikian, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa akses permodalan yang belum optimal dapat menjadi salah satu faktor yang membatasi peningkatan kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Karangasem. Semakin sulit pelaku usaha memperoleh modal yang memadai, semakin besar pula kemungkinan usaha tetap berada pada skala kecil dan tidak berkembang secara berkelanjutan.

Akses permodalan merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam mendukung perkembangan serta kinerja UMKM, karena tersedianya modal memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menjalankan operasional, melakukan investasi, serta mengembangkan skala usaha. Wismanjaya dan Werastuti (2022) menemukan bahwa kemudahan memperoleh modal berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan, produktivitas, dan pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng. Fikriyah dan Nuraeni (2025) juga menegaskan bahwa akses keuangan menjadi faktor signifikan dalam meningkatkan kinerja usaha, bahkan setelah mempertimbangkan kompetensi kewirausahaan dan modal sosial. Hasil penelitian Gunawan dan Suandana (2024) menunjukkan bahwa akses permodalan menjadi faktor yang paling dominan serta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UKM. Di sisi lain, penelitian Oktariani dkk. (2022) memperoleh hasil yang berbeda, yaitu akses permodalan tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja UMKM.

Pilar ketiga, yakni literasi keuangan, merupakan representasi dari modal manusia (*human capital*) dalam ekosistem kewirausahaan. Literasi keuangan menjadi salah satu aspek internal yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan UMKM. Kemampuan ini tercermin dari pemahaman pelaku usaha mengenai konsep-konsep dasar keuangan, termasuk pengelolaan modal kerja, pencatatan transaksi, penyusunan anggaran, manajemen risiko, dan pengendalian arus kas. Dalam perspektif *Entrepreneurial Ecosystem Theory* (EET), kapasitas pengetahuan dan kemampuan manajerial pelaku usaha merupakan bagian dari elemen ekosistem yang memengaruhi performa usaha, Ketersediaan sumber daya bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan, karena kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya secara efektif juga memiliki peran yang penting (Stam & Spiegel, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan pelaku UMKM di Kabupaten Karangasem, diketahui bahwa tingkat literasi keuangan yang dimiliki sebagian pelaku usaha masih tergolong rendah. Hal tersebut tercermin dari masih banyaknya pelaku UMKM yang belum melakukan pencatatan keuangan secara rutin, belum memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, serta belum menyusun perencanaan keuangan secara sistematis. Kondisi tersebut berdampak pada kesulitan pelaku usaha dalam mengelola arus kas, menghitung laba usaha secara tepat, dan menentukan keputusan keuangan yang sesuai. Salah seorang pelaku UMKM di bidang kuliner mengungkapkan bahwa:

“Tiang tusing taen khusus nyatet pendapatan lan biaya tiange; Tiang biasane tuah anggon bisnis lan kebutuhan sedina-dina. Dadi kadang tiang tusing nawang pastika apa tiang maan untung apa tusing.”

(“Saya tidak pernah mencatat secara khusus pemasukan dan pengeluaran, biasanya langsung dipakai saja untuk kebutuhan usaha dan sehari-hari. Jadi kadang tidak tahu pasti untung atau tidak”).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha belum memiliki pemahaman yang cukup terkait pentingnya pencatatan keuangan. Akibatnya, pelaku usaha tidak dapat memonitor kondisi keuangan usahanya secara jelas, sehingga berpotensi mengalami kesalahan dalam pengelolaan dana dan penggunaan modal. Selain itu, pelaku UMKM lainnya juga mengungkapkan bahwa:

“Yen pipis masuk, biasane langsung anggon meli bahan-bahan utawi kebutuhan ane lenan, tanpa taen ngae rencana ane pasti. Dadi, yen ada kebutuhan nadak, kadang-kadang kewedh.”

(“Kalau ada uang masuk, biasanya langsung dipakai untuk beli bahan atau kebutuhan lain, belum pernah buat perencanaan khusus. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, kadang kesulitan”).

Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengelolaan keuangan usaha. Ketidakmampuan dalam mengatur arus kas dan alokasi dana menyebabkan usaha menjadi rentan terhadap ketidakstabilan keuangan, terutama ketika terjadi penurunan pendapatan atau peningkatan biaya operasional. Dengan demikian, rendahnya literasi keuangan yang ditandai dengan kurangnya pencatatan, perencanaan, dan pengelolaan keuangan yang baik berpotensi menjadi salah satu faktor yang membatasi peningkatan kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Karangasem. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pelaku usaha dalam memahami dan mengelola aspek keuangan secara efektif sangat diperlukan agar usaha dapat berkembang dan memiliki kondisi keuangan yang lebih stabil.

Literasi keuangan dipandang sebagai salah satu faktor yang berperan penting dalam memengaruhi kinerja keuangan, terutama dalam pengelolaan keuangan UMKM (Artha dkk., 2026). Tingkat pemahaman yang baik mengenai

pengelolaan keuangan dapat membantu pelaku usaha mengambil keputusan keuangan secara lebih efektif, sehingga mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha. Hasil penelitian Putri dkk. (2024) dan Mahya (2025) menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja finansial, baik dari sisi pertumbuhan laba, efisiensi operasional, maupun stabilitas arus kas. Temuan tersebut diperkuat oleh Primandari dkk. (2024) yang menyatakan bahwa literasi keuangan turut berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan usaha untuk jangka panjang. Selaras dengan hasil tersebut, Dewi dan Sulindawati (2025) juga membuktikan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Di sisi lain, hasil penelitian Pradipta (2022) menunjukkan temuan yang berbeda, yaitu literasi keuangan tidak terbukti memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pilar keempat, yakni Kebijakan pemerintah sebagai pilar kebijakan (*policy*) yang menentukan aturan main dalam ekosistem. Peran pemerintah melalui berbagai kebijakan menjadi salah satu faktor eksternal yang turut menentukan kinerja keuangan UMKM. Dalam perspektif *Entrepreneurial Ecosystem Theory* (EET), kebijakan publik dan dukungan kelembagaan menjadi elemen kunci yang membentuk kualitas ekosistem kewirausahaan di suatu wilayah, mengingat keberhasilan usaha merupakan hasil interaksi berbagai faktor, tidak hanya karakter pelaku usaha dan mekanisme pasar, tetapi juga regulasi, program, serta fasilitas yang disediakan institusi publik (Stam & Spiegel, 2016). Kebijakan pemerintah berfungsi sebagai *enabling environment* yang memengaruhi kemudahan akses modal, pasar, pengetahuan, serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Intervensi seperti pelatihan manajerial, fasilitasi pembiayaan, pendampingan usaha,

kemudahan perizinan, dan dukungan pemasaran dapat menurunkan biaya transaksi serta meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM (Dewi dkk, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan pelaku UMKM di Kabupaten Karangasem, diketahui bahwa implementasi kebijakan pemerintah belum dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh pelaku usaha. Salah satu pelaku UMKM menyampaikan bahwa program bantuan, pelatihan, maupun pendampingan usaha memang tersedia, tetapi belum merata dan belum menjangkau semua pelaku usaha secara efektif. Selain itu, masih terdapat pelaku usaha yang merasa bahwa informasi terkait program pemerintah kurang tersosialisasi dengan baik, sehingga mereka belum dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk meningkatkan kapasitas usaha. Salah satu pelaku UMKM menyampaikan bahwa:

“Sujatine ada program pemerintah, nanging tusing makejang ane ngelah bisnis nawang ento atau nyidaang nyarengin. Kadang-kadang informasine telat teka, nak iraga tusing ngelah galah anggon manfaat bantuan utau pelatihan ane ada.”

(“Sebenarnya ada program dari pemerintah, tapi tidak semua pelaku usaha tahu atau bisa ikut. Kadang informasinya terlambat sampai, jadi kami tidak sempat memanfaatkan bantuan atau pelatihan yang ada”).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang seharusnya dapat membantu pengembangan UMKM belum sepenuhnya berjalan optimal dalam mendukung kebutuhan pelaku usaha. Kurangnya sosialisasi dan keterjangkauan program membuat manfaat kebijakan belum dirasakan secara langsung oleh sebagian UMKM. Pelaku UMKM lainnya juga mengungkapkan bahwa:

“Ada bantuan atau pelatihan, nanging tusing ja sujatine mapangaruh teken bisnis tiange, nak tusing ada dukungan tindak lanjut. Keto masih disubane pelatihan suud, tiang masih tusing yakin dija lakar ngembangang bisnis tiange.”

(“Pernah ada bantuan atau pelatihan, tapi belum terlalu berpengaruh ke usaha saya karena belum ada pendampingan lanjut. Jadi setelah kegiatan selesai, kami tetap bingung mau mengembangkan usaha dari mana”).

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mampu memberikan dampak berkelanjutan terhadap penguatan usaha. Tanpa pendampingan dan tindak lanjut yang memadai, program yang diberikan cenderung hanya bersifat sementara dan belum mampu mendorong peningkatan pendapatan, efisiensi operasional, maupun pengelolaan keuangan secara signifikan. Dengan demikian, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang belum optimal dalam pelaksanaan dan pemerataannya dapat mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Karangasem belum berlangsung secara optimal. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran, mudah diakses, dan berkelanjutan sangat dibutuhkan agar UMKM dapat berkembang dan memiliki kondisi keuangan yang lebih baik.

Kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor penting yang berperan dalam mendukung perkembangan dan keberlanjutan UMKM. Dukungan kebijakan yang tepat dapat menciptakan lingkungan usaha yang kondusif serta membantu pelaku UMKM dalam mengatasi berbagai keterbatasan yang dihadapi. Penelitian oleh Pradnyani & Yuniarta (2024); Rachmawaty (2022); serta Purwaningsih & Haryono (2019) mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terbukti memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap perkembangan UMKM. Selain itu, Tambunan (2023) menegaskan bahwa kebijakan dan program dari pemerintah daerah berkontribusi secara nyata terhadap keberlanjutan dan kemampuan UMKM untuk melakukan eskalasi bisnis (naik kelas) dalam jangka

panjang. Namun, penelitian oleh Pramestiningrum dan Iramani (2020) menemukan bahwa Dalam kelompok metropolitan UKM, kebijakan pemerintah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja bisnis UKM.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengkaji secara komprehensif pengaruh *entrepreneurial spirit*, akses permodalan, literasi keuangan, dan kebijakan pemerintah terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Karangasem. Fokus penelitian diarahkan pada fenomena tingginya rata-rata *Non-Performing Loan* (NPL) di Kabupaten Karangasem selama periode 2022 hingga 2024, yang mencerminkan adanya permasalahan dalam kualitas kredit, khususnya pada sektor UMKM, meskipun jumlah pelaku usaha terus mengalami peningkatan. Dengan mengintegrasikan faktor internal dan eksternal dalam kerangka *Entrepreneurial Ecosystem Theory* (EET), Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) pada UMKM di Kabupaten Karangasem selama kurun waktu 2022–2024. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan bukti empiris yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan usaha serta menurunkan risiko kredit bermasalah.

Meskipun berbagai penelitian telah membuktikan bahwa *entrepreneurial spirit*, akses permodalan, literasi keuangan, dan kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap kinerja UMKM, Belum terdapat konsensus empiris mengenai pengaruh *entrepreneurial spirit*, akses permodalan, literasi keuangan, dan kebijakan pemerintah terhadap kinerja keuangan UMKM, khususnya pada daerah dengan karakteristik dominasi usaha mikro dan risiko pembiayaan yang tinggi seperti

Kabupaten Karangasem. Penelitian terdahulu umumnya menitikberatkan pada pertumbuhan usaha atau keberlanjutan secara umum, tanpa mengaitkan secara spesifik dengan indikator kesehatan finansial yang berimplikasi pada risiko kredit seperti *Non-Performing Loan* (NPL). Di samping itu, kajian yang mengintegrasikan faktor internal dan eksternal dalam satu kerangka terpadu berbasis *Entrepreneurial Ecosystem Theory* (Stam & Spigel, 2016), khususnya pada konteks Kabupaten Karangasem yang memiliki karakteristik dominasi usaha mikro serta rata-rata NPL tertinggi di Provinsi Bali. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian dalam memahami secara komprehensif determinan kinerja keuangan UMKM di daerah dengan tekanan ekonomi dan risiko pembiayaan yang relatif tinggi.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memperkuat kinerja keuangan UMKM sebagai upaya mendorong pertumbuhan usaha sekaligus menekan risiko kredit bermasalah di Kabupaten Karangasem. Kinerja keuangan yang rendah tidak hanya menghambat akumulasi aset dan ekspansi usaha, tetapi juga berpotensi meningkatkan NPL yang berdampak pada stabilitas sektor keuangan daerah. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan integratif berbasis *Entrepreneurial Ecosystem Theory* (EET) dalam menjelaskan determinan kinerja keuangan UMKM pada konteks daerah dengan tingkat risiko pembiayaan yang relatif tinggi. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menguji pengaruh faktor internal seperti literasi keuangan atau *entrepreneurial spirit* secara parsial terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini mengintegrasikan faktor internal dan eksternal yang direpresentasikan melalui *entrepreneurial spirit*, akses permodalan, literasi keuangan, dan kebijakan pemerintah dalam satu model empiris.

Penelitian ini memiliki kebaruan kontekstual dengan menempatkan kinerja keuangan UMKM sebagai indikator kesehatan ekosistem kewirausahaan yang berkaitan dengan fenomena tingginya NPL UMKM di Kabupaten Karangasem. Pendekatan ini belum banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menilai kinerja usaha dari aspek pertumbuhan atau keberlanjutan bisnis tanpa mengaitkannya dengan risiko kredit dalam sistem keuangan daerah.

Berdasarkan berbagai permasalahan serta urgensi penelitian yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh *Entrepreneurial spirit*, Akses Permodalan, Literasi Keuangan, dan Kebijakan Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Karangasem.”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rata-rata *Non-Performing Loan* (NPL) Kabupaten Karangasem selama periode 2022–2024 tercatat sebesar 3,31% dan merupakan yang tertinggi di Provinsi Bali. Meskipun terjadi tren penurunan, Data tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan pada kinerja keuangan UMKM, khususnya dalam aspek profitabilitas, likuiditas, dan stabilitas arus kas usaha.

2. Inkonsistensi hasil penelitian terkait pengaruh *entrepreneurial spirit* terhadap kinerja keuangan UMKM mengindikasikan masih adanya kesenjangan empiris yang memerlukan pengujian lebih lanjut bagaimana *entrepreneurial spirit*, seperti inovasi, proaktivitas, dan keberanian mengambil risiko, memengaruhi peningkatan kinerja keuangan pelaku UMKM.
3. Akses permodalan sebagai faktor eksternal yang mendukung aktivitas usaha menunjukkan hasil penelitian yang beragam terhadap kinerja keuangan, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui sejauh mana kemudahan memperoleh pembiayaan memengaruhi pertumbuhan dan stabilitas keuangan UMKM.
4. Literasi keuangan dinilai memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan finansial, namun hasil penelitian sebelumnya masih belum konsisten, kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian empiris lebih lanjut untuk memverifikasi pengaruh pemahaman keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM dalam konteks penelitian yang relevan.
5. Kebijakan pemerintah sebagai bagian dari dukungan eksternal dalam ekosistem kewirausahaan menunjukkan efektivitas yang berbeda-beda dalam berbagai penelitian, sehingga diperlukan studi lebih lanjut untuk menganalisis bagaimana kebijakan yang diterapkan pemerintah memengaruhi kinerja keuangan UMKM.

1.3 Pembatasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pengujian pengaruh *entrepreneurial spirit*, akses permodalan, literasi keuangan, dan kebijakan pemerintah terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Karangasem. Kinerja keuangan diukur melalui indikator yang mencerminkan kemampuan usaha dalam memperoleh laba, mempertahankan likuiditas, mengelola arus kas, serta memenuhi kewajiban keuangan yang berkaitan dengan risiko *Non-Performing Loan* (NPL). Subjek penelitian meliputi pelaku UMKM yang aktif dan terdaftar di Kabupaten Karangasem selama periode penelitian, tanpa mempertimbangkan klasifikasi sektor usahanya. Penelitian ini tidak mengkaji variabel lain di luar variabel yang telah ditetapkan, seperti faktor makroekonomi, kondisi industri perbankan, maupun karakteristik sosial demografis pelaku usaha, kecuali sebagai informasi karakteristik responden. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar penelitian tetap terfokus, sistematis, dan mampu menghasilkan temuan empiris yang relevan dengan tujuan penelitian.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup atau pembatasan penelitian yang telah ditetapkan, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut.

- 1) Apakah *entrepreneurial spirit* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Karangasem?
- 2) Apakah akses permodalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Karangasem?

- 3) Apakah literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Karangasem?
- 4) Apakah kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Karangasem?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh *entrepreneurial spirit* terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Karangasem.
2. Menganalisis pengaruh akses permodalan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Karangasem.
3. Menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Karangasem.
4. Menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Karangasem.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang kewirausahaan, akuntansi, serta pengelolaan keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui analisis mengenai pengaruh *entrepreneurial spirit*, akses permodalan, literasi keuangan, dan kebijakan pemerintah terhadap kinerja

keuangan UMKM, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori yang menjelaskan peran faktor internal dan faktor eksternal dalam memengaruhi kinerja keuangan usaha. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin mengembangkan kajian sejenis dengan objek, pendekatan, maupun lokasi penelitian yang berbeda, sehingga dapat memperluas khazanah keilmuan mengenai kinerja keuangan UMKM dalam konteks perekonomian daerah.

1.6.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih komprehensif kepada pelaku UMKM mengenai faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan kinerja keuangan usaha. Melalui hasil penelitian ini, pelaku usaha diharapkan dapat menyadari pentingnya memiliki *entrepreneurial spirit* yang kuat, meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan usaha, serta memanfaatkan akses permodalan yang tersedia secara lebih optimal. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi pelaku UMKM untuk lebih aktif memanfaatkan berbagai program dan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha, sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang secara lebih berkelanjutan.

b) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam merumuskan kebijakan serta program pemberdayaan UMKM yang lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan

kebutuhan pelaku usaha. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi aktual yang dihadapi oleh pelaku UMKM, termasuk dalam hal keterbatasan akses permodalan, tingkat literasi keuangan, serta pemanfaatan kebijakan pemerintah. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat merancang strategi pengembangan UMKM yang lebih terarah melalui program pelatihan kewirausahaan, peningkatan literasi keuangan, serta penyediaan fasilitas pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh pelaku usaha.

c) Bagi Lembaga Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada lembaga keuangan mengenai karakteristik serta kebutuhan permodalan pelaku UMKM. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi lembaga keuangan dalam merancang produk dan layanan pembiayaan yang lebih sesuai dengan kondisi serta kebutuhan pelaku usaha. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan inklusi keuangan melalui penyediaan skema pembiayaan yang lebih fleksibel, mudah diakses, dan mampu menunjang keberlanjutan serta perkembangan UMKM.

d) Bagi Akademisi dan Peneliti

Bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi ilmiah dalam mengembangkan kajian mengenai *entrepreneurial spirit*, literasi keuangan, akses permodalan, kebijakan pemerintah, serta kinerja keuangan UMKM. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang ingin menyempurnakan model penelitian melalui penambahan variabel, penggunaan metode analisis yang berbeda, maupun

penerapan pada objek dan wilayah penelitian yang lain. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ilmiah serta memperluas kajian di bidang kewirausahaan dan pengelolaan UMKM.

